

## KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN AGROEKOWISATA KECAMATAN TUTURDI KABUPATEN PASURUAN

Jojok Dwirido Tjahjono<sup>1</sup>, Maroeto<sup>2</sup>, Purnomo Edi Sasongko<sup>3</sup> dan A. Zainul Arifin<sup>4</sup>

**Abstrak:** Kajian kebijakan dan strategi ini berdasarkan tiga indikator yang menjadi tinjauan penulis adalah pada indikator penataan kawasan agroekowisata yang menjadi item penilaiannya adalah pembagian fungsi kawasan, peruntukan lahan, pembuatan sirkulasi dan penghubung serta pengembangan sarana prasarana dapat dikatakan kurang terlaksana dengan baik atau pada hasil kajian yang didasari pada konsep awal dapat dikatakan gagal dalam pencapaian target yang diinginkan. Hal ini juga didasari pada faktor pendukung dan penghambat. Sebagai faktor pendukung adalah adanya kebijakan pemerintah Kabupaten Pasuruan berdasar RPJMD 2013-2018 dan juga potensi wilayah dan sumber daya alam Kecamatan Tukur. Kemudian yang menjadi penghambat adalah keterbatasan keuangan daerah, kurangnya dukungan aparatur dan birokrasi pemerintah, kendala struktural dan kultural, keterbatasan sosial ekonomi dan keterbatasan SDM.

**Kata Kunci :** penataan kawasan, agroekowisata, RPJMD Kabupaten Pasuruan.

*Abstract: This policy and strategy study based on the three indicators that are reviewed by the author is that the agroecotourism area structuring indicator which is the assessment item is the division of regional functions, land allotment, circulation and liaison and infrastructure development can be said to be less well implemented or the results of the study are based the initial concept can be said to fail in achieving the desired target. This is also based on supporting and inhibiting factors. As a supporting factor is the government policy of Pasuruan Regency based on RPJMD 2013-2018 and also the potential of the region and natural resources of Tukur District. Then the obstacle is the limited regional finances, lack of support from government apparatus and bureaucracy, structural and cultural constraints, socio-economic limitations and limited human resources.*

*Keywords: regional arrangement, agroekowisata, RPJMD Pasuruan Regency*

### PENDAHULUAN

Kebijakan pengembangan pariwisata di Indonesia, dalam pelaksanaannya masih menitikberatkan pada usaha pariwisata sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan. Pada dekade terakhir, pembangunan pariwisata di Indonesia maupun di mancanegara menunjukkan kecenderungan terus meningkat. Kecenderungan pemenuhan kebutuhan dalam bentuk menikmati obyek-obyek spesifik yang berbasis lingkungan merupakan signal tingginya permintaan akan wisata agro. Agrowisata merupakan rangkaian kegiatan wisata yang memanfaatkan potensi pertanian sebagai obyek wisata, baik potensi berupa pemandangan alam kawasan pertaniannya maupun kekhasan dan keanekaragaman aktivitas produksi dan teknologi pertanian serta budaya masyarakat petaninya.

Kegiatan agrowisata bertujuan untuk memperluas wawasan pengetahuan, pengalaman rekreasi dan hubungan usaha di bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan. Melalui pengembangan agrowisata yang menonjolkan budaya lokal dalam memanfaatkan lahan, dapat meningkatkan pendapatan petani sambil melestarikan sumber daya lahan, serta memelihara budaya maupun teknologi lokal yang umumnya telah sesuai dengan kondisi lingkungan alamnya.

---

Jojok Dwirido Tjahjono, Maroeto dan Purnomo Edi Sasongko adalah Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. A. Zainul Arifin adalah dosen Universitas Merdeka Pasuruan

Dalam upaya pengembangan pariwisata di Indonesia, pemerintah membuat beberapa kebijakan tentang pariwisata, yaitu: a) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, b) Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, c) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, d) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam, e) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2010-2025, f) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata, g) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, h) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2000 tentang Badan Pengembangan Pariwisata dan Kesenian, i) Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata, j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat.

Pembangunan kawasan agrowisata secara ekonomis dapat meningkatkan pertumbuhanekonomis masyarakat desa Tukur khususnya, dan Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan umumnya. Disisi lain, yang dapat menjadi ancaman sosialbilamana perubahan-perubahan yang terjadi tidak dibarengi dengan kesiapan wilayahsetempat khususnya sumber daya manusianya. Dengan semua potensi yang ada Pemerintah Kabupaten Pasuruan bercita-cita menjadikan Kecamatan tutur Tukur sebagai Pusat Agroekowisata yang didukung oleh Agribisnis, Agrowisata dan Pariwisata yang Agamis, Berdaya Saing, Mandiri, dan Sejahtera pada Tahun 2025, sebagaimana tertuang dalam VisiKabupaten Pasuruan.

Berhubungan dengan hal tersebut pengembangan suatu kawasan termasuk bidangkepariwisataan perlu diperhatikan berbagai aspek, salah satunya aspek sosioekonomipenduduk lokal. Hal ini akan dipandang penting karena kepariwisataan akan memberikandampak terhadap penduduk setempat, baik positif atau negatif. Sebagai dasar pembentukan Tim Pokja Kawasan AgropolitanKabupaten Pasuruan yang dimaksud adalah denganpertimbangan bahwadalam rangka menunjang kegiatan dan meningkatkan sektor agrobisnis di sentra produksi, maka kegiatan yang berpotensi agrowisata perlu ditingkatkan. Kemudian untukmewujudkan hal yang dimaksud diatas, diperlukan adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan khususnya dibidang agrowisata.Disamping keterpaduan serta koordinasi yang mantapdari berbagai pihak pada Satuan kerja Perangkat daerah terkait baik sektoral maupun lintas sektoral sehinggauntuk memenuhi kegiatan yang dimaksud, dipandang perlu membentuk Tim Pembina Agrowisata Kecamatan Tukur.

Adapun maksud program Kegiatan Pengembangan Kawasan Agroekowisata adalah untukmembentuk, menyelaraskan dan mengendalikan pembangunan fisik, budaya dan kegiatanpariwisata serta pemberdayaan masyarakat dikawasan mempura sebagai kawasan agrowisata.Sedangkan tujuannya adalah : (1) Membuat konsep awal penataan kawasan untuk

pengembangan kawasan agrowisata yang memiliki daya saing, daya tarik investasi dan tetapmemiliki karakter budaya melayu. (2) Menata kawasan dengan mempertimbangkan aspekarsitektural, fungsional dan pola penataan lingkungan yang sesuai dengan kebijakankawasan. (3) Mengimplementasikan konsep penataan kawasan dalam perencanaan tapak, tataletak, sirkulasi, lensekap dan pola lingkungan.

Kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Pasuruan, dalam pelaksanaannya masih menitikberatkan pada usaha pariwisata sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata. Pada dekade terakhir, pembangunan pariwisata di Indonesia maupun di mancanegara menunjukkan kecenderungan terus meningkat. Kecenderungan pemenuhan kebutuhan dalam bentuk menikmati obyek-obyek spesifik yang berbasis lingkungan merupakan signal tingginya permintaan akan wisata agro. Agrowisata merupakan rangkaian kegiatan wisata yang memanfaatkan potensi pertanian sebagai obyek wisata, baik potensi berupa pemandangan alam kawasan pertaniannya maupun kekhasan dan keanekaragaman aktivitas produksi dan teknologi pertanian serta budaya masyarakat petaninya.

Kegiatan agrowisata bertujuan untuk memperluas wawasan pengetahuan, pengalaman rekreasi dan hubungan usaha di bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan. Melalui pengembangan agrowisata yang menonjolkan budaya lokal dalam memanfaatkan lahan, dapat meningkatkan pendapatan petani sambil melestarikan sumber daya lahan, serta memelihara budaya maupun teknologi lokal yang umumnya telah sesuai dengan kondisi lingkungan alamnya.

Kabupaten Pasuruan sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki banyak potensi sumber daya alam, seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan serta kelautan. Potensi sumber daya alam Kabupaten Pasuruan, antara lain: a) Pertanian, berdasarkan pada potensi sumberdaya lahan ternyata jenis penggunaan lahan sawah dan tegalan masih cukup luas yaitu 50.098 Ha atau 44,78 % dari luas wilayah Kabupaten Pasuruan. Dari sektor pertanian ini menghasilkan beberapa komoditi seperti padi, jagung, ubi-ubian, kacang-kacangan, kedelai, buah-buahan, dan sayur-sayuran; b) Perikanan, dengan semakin berkembangnya usaha perikanan laut maupun darat maka kebutuhan benih ikan juga semakin meningkat oleh karena itu peluang investasi komoditi perikanan tidak hanya budidaya ikan melainkan pembenihan ikan dan juga olahan hasil perikanan. Dengan hasil komoditi seperti tongkol, dorang, kepiting/rajungan, udang, gurame, lele, patin, tombro, dan lain-lain; c) Peternakan, pengembangan usaha peternakan cukup potensial dimana daya dukung wilayah masih cukup besar dengan ketersediaan pakan. Komoditi peternakan yang potensial dikembangkan ada tujuh komoditas yaitu sapi potong, sapi perah, kambing, domba, ayam buras, ayam ras pedaging, ayam ras petelur, dan itik; d) Perkebunan, tanaman perkebunan merupakan salah satu komoditi yang dijadikan bahan baku sektor industri pengolahan. Adapun jenis tanaman perkebunan yang menonjol di Kabupaten Pasuruan yaitu meliputi: kopi, tebu, , cengkeh, kakao, tembakau, kelapa, kapuk randu, jambu mete dan pandan; e) Kehutanan, keberadaan hutan di Kabupaten Pasuruan dengan luas mencapai 16.787 Ha yang terdiri dari hutan produksi seluas 14.535 Ha (86,58 persen), hutan lindung seluas 873 Ha (5,20 persen), hutan tebang pilih seluas 296 Ha (1,76 persen) dan suaka alam/ hutan wisata/ taman nasional seluas 1083 Ha (6,45 persen).

Wilayah Kecamatan Tutar Kabupaten Pasuruan, yang termasuk dalam kawasan cagar biosfer Taman Nasional Bromo Tengger Semeru; memiliki panorama alam yang indah dan berbagai potensi dari objek wisata yang menarik. Potensi pariwisata kabupaten Pasuruan secara umum dibagi menjadi empat, antara lain: (1) Wisata Umum: 1) Tirta Wisata Banyubiru: obyek wisata lokal yang memiliki kolam memancing, kolam renang dan lapangan tenis.; 2) Taman Safari Prigen: 3) Kebun Raya Purwodadi; 4) Taman Dayu Water Park, 5) Saigon Water Park, 6) Kaliandra; 7) Agrowisata Bakti Alam; 8) Wisata Bukit Flora, 9) wisata petik apel Nongkojajar; (2) Wisata Alam: Panorama Gunung Bromo, Air Terjun Kakek Bodo, Cuban Baung, Sumber Nyonya (3)

Wisata Sejarah, Candi Jawi, Petilasan raja Airlangga di Jolotundo, (4) Wisata Religius, kompleks makam Segoropuro,

Tutur merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Pasuruan, yang terletak di sebelah selatan kota Pasuruan. Wilayah Kecamatan Tutur berada di daerah dataran tinggi dengan ketinggian 500 – 1500m dpl. Kecamatan Tutur berbatasan dengan Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang. Berada di daerah dataran tinggi, Kecamatan Tutur kaya akan keanekaragaman hayati dan terkenal dengan buah apel dan kebun kopinya. Sebagian besar Kecamatan Tutur memiliki pemandangan yang luar biasa indahnya dan masih tergolong alami.

Dalam bidang pertanian dan perkebunan, Kecamatan Tutur yang terletak di lereng gunung Bromo kaya akan produk unggulan hasil bumi seperti kopi, apel, cengkeh, kakao, durian, dan apokat yang terkenal cita rasanya. Pada pertengahan tahun dan akhir tahun biasanya adalah puncak panen raya untuk beberapa produk unggulan seperti durian, apokat mentega dan apel. Dalam bidang peternakan Kecamatan Tutur juga terkenal dengan potensi sapi perah dan madu. Kecamatan Tutur memiliki potensi sumberdaya alam yang luar biasa berupa potensi wisata, pertanian, perkebunan, peternakan, dan produk unggulan hasil kreativitas warga masyarakat Kecamatan Tutur. Selain menyimpan keanekaragaman hayati, Kecamatan Tutur juga menyimpan 48 titik mata air yang sangat penting bagi warga Tutur dan Kabupate/Kota Pasuruan. Beberapa potensi sumber daya potensial yang belum dioptimalkan yang ada di Kecamatan Tutur, antara lain: a) Wisata Agro Perkebunan Hortikultura. Kawasan perkebunan dengan topografi pegunungan yang berada di Desa Tutur dan Desa Kalipucang, Kecamatan Tutur ini berfungsi sebagai daerah resapan air dan kawasan konservasi lahan. Saat ini tengah dikembangkan sebagai agrowisata dengan tanaman utama kopi, apel dan bunga potong (Krisan); b) Air Terjun Sumber Nyonya merupakan air terjun dengan ketinggian 20 meter, dan terletak di ketinggian 750-1000 meter di atas permukaan air laut. Terletak di Dusun Gunungsari, Desa Tutur, Kecamatan Tutur; c)

Kecamatan Tutur dengan potensi dalam pengembangan agrowisata yaitu memiliki panorama yang indah, hal ini disebabkan daerah berupa perbukitan serta memiliki berbagai jenis tanaman yang dibudidayakan seperti apel, kopi, dan bunga krisan. Sebagaimana di atur dalam Keputusan Bupati Pasuruan Nomor: 12 tahun 2010 tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Agropolitan Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Tutur ditetapkan sebagai lokasi dan komoditas unggul dalam kawasan agropolitan.

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa kecamatan Tutur memiliki potensi wisata yang dapat memberdayakan masyarakat sekitar serta dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun, potensi sumber daya alam tersebut masih belum dioptimalkan secara maksimal oleh pemerintah. Untuk meningkatkan perkembangan potensi pariwisata yang ada di Kecamatan Tutur dibutuhkan suatu kebijakan yang mengatur tentang pariwisata. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk mengetahui bagaimana pengembangan pariwisata yang ada di Kecamatan Tutur dalam perspektif analisis kebijakan.

Teknik penentuan informan dilakukan secara *purposive*, dimana informan yang dipilih merupakan pihak yang dianggap paling mengetahui dan memahami tentang permasalahan dalam penelitian ini. Pemilihan informan dilakukan berdasarkan letak potensi pariwisata. Sehingga peneliti mengambil sebagai informan kunci (*key informant*) yaitu Desa Tutur, Desa Kalipucang, Desa Andonosari, Desa Sumberpitu, dan Desa Wonorejo.

## **ANALISIS KEBIJAKAN TERHADAP PENGEMBANGAN PARIWISATA**

Analisis kebijakan adalah aktivitas intelektual dan praktis yang ditunjukkan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan dalam proses kebijakan (Nugroho D., 2007:7). Definisi analisis kebijakan dari Walter William adalah sebuah cara penyintesisan informasi termasuk hasil-hasil penelitian, untuk menghasilkan format keputusan kebijakan (yang ditentukan dari sejumlah alternatif pilihan) dan menentukan informasi yang relevan dengan kebijakan (Nugroho D., 2007:36). Sedangkan menurut Thomas R. Dye, analisis kebijakan adalah apa sesungguhnya yang dilakukan pemerintah-pemerintah, kenapa mereka melakukannya, dan apa yang menyebabkan capaian hasilnya berbeda-beda (Wahab, 2011:4).

Dapat disimpulkan bahwa analisis kebijakan adalah sebuah cara penyintesisan informasi termasuk hasil-hasil penelitian, untuk menghasilkan dan menciptakan format keputusan kebijakan (yang ditentukan dari sejumlah alternatif pilihan), secara kritis menilai, mengkomunikasikan pengetahuan dan menentukan informasi yang relevan tentang dan dalam proses kebijakan.

Suatu kebijakan esensinya akan mencerminkan/menggambarkan strategi, prioritas, tujuan, sasaran, dan hasil (*outcome*) yang diharapkan. Agar kebijakan berfungsi efektif, diperlukan “instrumen/alat” kebijakannya (*policy tools/ instruments*). Jadi, instrumen kebijakan adalah seperangkat langkah atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk merealisasikan kebijakan yang ditetapkan. Menurut Tatang A. Taufik setiap (atau kombinasi beberapa) instrumen kebijakan biasanya melibatkan (mengandung) setidaknya 3 (tiga) aspek, yaitu: 1) piranti hukum menyangkut aspek legal/hukum yang mendukungnya (melandasinya); 2) tatanan kelembagaan berkaitan dengan tatanan lembaga (organisasi) yang terlibat, fungsi/peran dan pengorganisasian (struktur dan hubungan atau interaksi antar aktor); 3) mekanisme operasional berkaitan dengan pola, cara/metode dan prosedur serta proses pelaksanaan dalam implementasi praktis. Selain itu, hal yang juga penting diper-timbangkan berkaitan dengan perancangan instrument kebijakan adalah tatanan sosial (*social arrangement*) bagi konteks kebijakan tersebut (Taufik, 2005: 44).

Dengan adanya analisis kebijakan tersebut, dalam penelitian ini menggunakan instrumen kebijakan yaitu: piranti hukum, tatanan kelembagaan, dan mekanisme operasional.

## **ANALISIS KEBIJAKAN TERHADAP PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KECAMATAN TUTUR**

Berdasarkan teori menurut Tatang A. Taufik setiap (atau kombinasi beberapa) instrumen kebijakan biasanya melibatkan (mengandung) setidaknya 3 (tiga) aspek, yaitu: piranti hukum, tatanan kelembagaan, dan mekanisme operasional. Berikut akan disajikan mengenai ketiga instrumen tersebut dalam kaitannya dengan analisis kebijakan terhadap pengembangan pariwisata di Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan.

Piranti hukum merupakan aspek legal/hukum yang mendukungnya (melandasinya). Kebijakan pengembangan pariwisata sangat penting dalam meningkatkan perkembangan pariwisata terutama di Kecamatan Tukur yang memiliki banyak potensi wisata. Dengan adanya kebijakan pengembangan pariwisata, pemerintah dituntut untuk ikut berpartisipasi dalam mengembangkan potensi pariwisata. Namun, kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Pasuruan belum ada sehingga kegiatan pengembangan pariwisata belum berjalan secara maksimal. Pengembangan pariwisata dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) dengan membentuk program-program pengembangan pariwisata yang didasarkan pada tugas pokok dan

fungsi DISBUDPAR yang diatur dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasuruan. Program yang dilakukan DISBUDPAR untuk mendukung pelaksanaan pengembangan pariwisata yang ada di Kecamatan Tuter adalah program promosi pariwisata, program pengembangan destinasi pariwisata dan program kemitraan pariwisata. Penyelenggaraan festival petik kopi dan *putri kopi* adalah salah satu bentuk kegiatan promosi pariwisata yang dilakukan oleh DISBUDPAR dalam me-ngembangkan pariwisata yang ada di Kecamatan Tuter.

Tatanan kelembagaan berkaitan dengan tatanan lembaga (organisasi) yang terlibat, fungsi/peran dan pengorganisasian (struktur dan hubungan atau interaksi antar aktor). Dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata, tatanan kelembagaan menjadi salah satu indikator agar kebijakan pengembangan pariwisata dapat berjalan dengan baik. Untuk mengembangkan dan membangun pariwisata, diperlukan dukungan dari berbagai pihak melihat latar belakang dunia pariwisata yang memiliki banyak fungsi dan kegunaan untuk masyarakat maka dalam mengembangkan pariwisata harus melibatkan pemerintah sebagai motor penggerakannya. Peran Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam pengembangan pariwisata sudah mulai ikut untuk berpartisipasi. Peran Pemerintah Kabupaten Pasuruan adalah dengan meningkatkan kerjasama dengan instansi-instansi terkait, *stakeholder*, dan dengan masyarakat setempat serta mempromosikan pariwisata melalui seminar-seminar. Dalam melaksanakan kegiatan pengembangan pariwisata, sebagai pengelola pariwisata, DISBUDPAR harus menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik antar sesama pegawai. Kerjasama dan komunikasi antar pegawai sudah terjalin dengan baik karena adanya pembinaan dan pelatihan, dibuktikan dengan keikutsertaan seluruh pegawai dalam acara yang diadakan oleh DISBUDPAR dalam pengembangan pariwisata. Dari beberapa penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tatanan kelembagaan dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan pariwisata di Kecamatan Tuter meliputi peran Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan hubungan kerjasama dan komunikasi antar pegawai sudah mulai berjalan dengan baik.

Mekanisme operasional (*operational mechanism*) berkaitan dengan pola, cara/metode dan prosedur serta proses pelaksanaan dalam implementasi praktis. Pelaksanaan kegiatan pengembangan pariwisata dilaksanakan secara manual yang dilakukan oleh masyarakat dengan mengelola beberapa obyek wisata, sedangkan DISBUDPAR melakukan kerjasama dengan berbagai instansi-instansi terkait serta mempromosikan potensi pariwisata yang ada di Kecamatan Tuter baik tingkat regional maupun nasional melalui seminar-seminar maupun internet. Dengan adanya kegiatan pengembangan pariwisata di Kecamatan Tuter, perkembangan pariwisata di Kecamatan Tuter terutama wisata alamnya mengalami kenaikan cukup berarti dari sisi kesadaran masyarakat akan berwisata sehingga jumlah pengunjung pariwisata meningkat terutama pada hari libur. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengembangan pariwisata dilakukan oleh masyarakat dan DISBUDPAR. Pengelolaan beberapa obyek wisata dilakukan oleh masyarakat, sedangkan kerjasama dengan berbagai instansi-instansi terkait serta mempromosikan potensi pariwisata melalui seminar-seminar maupun internet dilakukan oleh DISBUDPAR.

Tatanan sosial juga penting dipertimbangkan berkaitan dengan perancangan instrumen kebijakan. Dalam mengembangkan dan membangun pariwisata, diperlukan dukungan dari berbagai pihak baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Partisipasi masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam menunjang pembangunan

pariwisata. Partisipasi masyarakat di Kecamatan Tukur dalam pengembangan pariwisata sudah aktif, dibuktikan dengan adanya sebuah lembaga kelompok sadar wisata atau ladewi (lembaga desa wisata) serta adanya beberapa obyek wisata yang dikelola masyarakat. Dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata dibutuhkan partisipasi dari *stakeholder* pariwisata. *Stakeholder* adalah kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Partisipasi *stakeholder* adalah dengan mengelola beberapa obyek wisata yang ada di Kecamatan Tukur serta membantu mempromosikan potensi wisata yang ada. *Stakeholder* pariwisata yang membantu mempromosikan potensi wisata yang ada di Kecamatan Tukur adalah *travel agent* dan BPPD. Sedangkan yang membantu mengelola beberapa obyek wisata adalah karang taruna. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kecamatan Tukur sudah berpartisipasi aktif dalam pengembangan pariwisata dengan membentuk lembaga kelompok sadar wisata atau ladewi (lembaga desa wisata) serta adanya beberapa obyek wisata yang dikelola masyarakat. Sedangkan *stakeholder* pariwisata membantu mempromosikan potensi wisata yang ada dan juga ikut membantu mengelola beberapa obyek wisata.

### **KESIMPULAN**

Setelah melakukan analisa dan interpretasi pada bab sebelumnya, peneliti akan menyajikan kesimpulan dan saran dari penelitian berdasarkan hasil temuan data di lapangan. Kesimpulan ini akan menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis kebijakan terhadap pengembangan pariwisata di Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1) Dilihat dari sudut pandang teori dengan menggunakan 3 instrumen yaitu piranti hukum, tatanan kelembagaan dan mekanisme operasional dapat disimpulkan bahwa pengembangan pariwisata di Kecamatan Tukur sudah cukup baik; 2) Dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata, DISBUDPAR selalu berusaha dalam mengembangkan pariwisata di Kecamatan Tukur yaitu dengan melakukan program promosi pariwisata, program pengembangan destinasi pariwisata dan program kemitraan pariwisata. Program promosi pariwisata dilakukan dengan penyelenggaraan festival *kenduren* atau *kenduri* durian selain promosi pariwisata melalui internet. Sedangkan program kemitraan pariwisata, DISPORABUDPAR melakukan kerjasama dengan beberapa instansi terkait untuk membantu mengembangkan pariwisata di Kecamatan Tukur.

### **SARAN**

Saran hasil penelitian tentang analisis kebijakan terhadap pengembangan pariwisata di Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan, maka peneliti merekomendasikan saran sebagai berikut: 1) Membentuk suatu kebijakan pariwisata yang dapat mendukung pelaksanaan pengembangan pariwisata terutama di Kecamatan Tukur yang memiliki banyak potensi pariwisata; 2) Meningkatkan kerjasama dengan institusi-institusi terkait serta *stakeholder* pariwisata untuk menunjang kelancaran pariwisata seperti pengadaan dan perbaikan jalan, transportasi, serta fasilitas-fasilitas yang diperlukan di sekitar lokasi pariwisata; 3) Mengadakan pelatihan pengembangan sumber daya manusia agar dapat mengelola potensi pariwisata secara optimal sehingga pengembangan pariwisata berjalan dengan baik; 4) Memprioritaskan keselamatan pengunjung guna mencegah terjadinya kecelakaan di obyek wisata karena letak Kecamatan Tukur berada di dataran tinggi yang rawan banjir maupun longsor; 5) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pariwisata sehingga pengembangan pariwisata tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah tetapi juga masyarakat.

**Ucapan terima kasih** disampaikan kepada DRPM Ditjen Dikti Kemristekdikti yang telah mendukung kegiatan IbW sesuai dengan SP2 PPM No.057/SP2H/PPM/DRPM/II/2016.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Ariadi, Septi dan Sudarso. 2005. *Pengembangan Pengelolaan Wisata Alam : Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Jawa Timur*. Surabaya.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- BPS. 2015. *Pasuruan dalam Angka Tahun 2015*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan
- Bungin, Burhan M. 2008. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana
- Hawlett, Michael dan M. Ramest. 1995. *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. Canada: Oxford University Press
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media
- Ismayanti. 2010. *Pengantar Pariwisata*. Jakarta: Grasindo
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Mulyana, Deddy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nugroho D, Riant. 2007. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Gramedia
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik: Pemerintahan dan Otonomi Daerah* (Edisi Revisi). Jakarta: Grasindo
- Pendit, Nyoman S. 2003. *Ilmu Pariwisata: Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: Karya Grafis Digital (KARISTA)
- Pitana, I Gde dan Diarta, I Ketut Surya. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Andi
- Pitana, I Gde dan Gayatri, Putu G. 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: Andi
- Spillane, James J. 2001. *Ekonomi Pariwisata : Sejarah dan Prosesnya*. Yogyakarta: Konisius
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Taufik, Tatang A. 2005. *Pengembangan Sistem Inovasi Daerah: Perspektif Kebijakan*. Jakarta : Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Unggulan Daerah dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat
- Wahab, Solichin Abdul. 2011. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang : UMM Press
- Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Media Presindo